



1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAJENE

1.2.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Majene yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Letak geografis Kabupaten Majene berada pada antara 20 38' 45" – 30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00" - 1190 4' 45" Bujur Timur, dengan jarak ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km² atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat yang secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah Kabupaten Mamuju di sebelah Utara, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa di sebelah Timur, Teluk Mandar di sebelah Selatan dan selat Makassar di sebelah Barat. Kabupaten Majene terdiri atas 8 kecamatan dan 82 desa/kelurahan. Adapun wilayah administrasi kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.

Jumlah penduduk di Kabupaten Majene pada Tahun 2014 berdasarkan data BPS sebagai hasil proyeksi penduduk, adalah sebesar 161.132 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Banggae dengan penduduk sebesar 39.865 jiwa (24,74%) dan Kecamatan Banggae Timur dengan penduduk sebesar 30.341 jiwa (18,82%). Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, tercatat penduduk laki-laki sebesar 78.607 jiwa (48,78%) sedangkan penduduk perempuan sebesar 82.525 jiwa (51,21%).

Indeks Pembangunan Manusia kurun waktu tahun 2009 – 2013 menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Majene mengalami peningkatan. Data Tahun 2013, IPM Kabupaten Majene telah mencapai 73,16 atau meningkat sebesar 0,75 poin dari Tahun 2012. Pencapaian ini

sekaligus menempatkan Kabupaten Majene pada posisi tertinggi di Sulawesi Barat. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk yang tercermin dalam bentuk kontribusi komponen utama IPM. Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Majene dalam kurun waktu tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM Kabupaten Majene Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	IPM	70,83	71,34	71,86	72,41	73,16
2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,06	65,38	65,70	66,02	66,11
3.	Angka melek Huruf	94,71	94,72	94,75	94,77	96,53
4.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,18	8,40	8,44	8,50	8,51
5.	Kemampuan Daya Beli (Rp/Kapita)	638,640	643,700	644.810	649,06	652,90

Sumber : BPS Sulawesi Barat

1.2.2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Majene, sangat ditentukan oleh kondisi geografis daerah ini dengan tiga dimensi wilayah yang meliputi: perairan, dataran dan pegunungan. Hal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan sumber daya alam antar wilayah, sehingga nampak pada bervariasinya komoditi unggulan yang diusahakan di tiap-tiap wilayah tersebut.

Komoditi-komoditi yang menjadi potensi unggulan daerah ini dapat digambarkan per sektor sebagai berikut:

- 1) Sektor pertanian antara lain terdiri dari padi sawah, padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang hijau dan kacang tanah. Meskipun memiliki jumlah produksi yang dominan, namun produksi komoditi tanaman pangan belum mampu secara signifikan mengangkat kehidupan perekonomian masyarakat.
- 2) Sektor perkebunan antara lain terdiri dari kakao, kelapa dalam, kelapa hibrida, kemiri dan Cengkeh

- 3) Sektor kehutanan antara lain terdiri dari suren, gamelina, jati, ketapang, jabon dan durian
- 4) Sektor perikanan antara lain terdiri dari ikan tuna, cakalang, tongkol, layang, ikan terbang dan ikan layang, serta komoditi perikanan budidaya yang terdiri dari udang windu dan ikan bandeng. Dan salah satu jenis komoditi baru yang sangat potensial untuk di kembangkan adalah budidaya udang Vanama
- 5) Sektor peternakan terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam potong dan itik
- 6) Sektor pertambangan, antara lain lempung, batu pasir, batu gamping, dasit, andesit, pasir, batubara, bijih besi, dan emas. Berdasarkan hasil penyelidikan geologi lingkungan kawasan pertambangan Kabupaten Majene yang dilakukan oleh Departemen Energi, Sumberdaya dan Mineral RI, potensi tambang tersebut tersebar di semua Kecamatan.

Kontribusi sektor unggulan tersebut di atas terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Majene selama periode Tahun 2010 sampai 2013, terus memperlihatkan kecenderungan yang positif yang ditandai dengan peningkatan PDRB atas dasar harga yang berlaku seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 PDRB Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2013 (milyar rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Berlaku	Perkembangan (persen)
2010	1.339.663,41	19,41
2011	1.506.698,76	12,47
2012	1.672.717,94	11,02
2013	1.848.564,38	10,51
Rata-rata	Xxxxxx	13,35

Sumber : BPS Kabupaten Majene

Untuk laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada data PDRB atas dasar harga konstan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.3 PDRB Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2013 (milyar Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Pertumbuhan (persen)
2010	611,588,43	9,88
2011	657,603,17	7,52
2012	703.893,59	7,04
2013	743.052,47	5,56
Rata-rata	-	7,50

Sumber : BPS Kabupaten Majene

Sementara itu struktur ekonomi Kabupaten Majene pada kurun waktu tahun 2010 – 2013 tidak mengalami pergeseran yang berarti, yaitu masih didominasi sektor pertanian yang ditopang oleh subsektor perkebunan dengan kontribusi sekitar 19,90 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Majene kurun waktu 2010 – 2013 dapat di lihat pada tabel-tabel berikut ;

Tabel 1.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Majene Tahun 2010 – 2013 (persen)

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	50,56	50,51	48,87	47,46
2	Pertambangan dan Penggalian	0,79	0,90	0,96	1,02
3	Industri dan Pengolahan	3,16	3,12	2,99	3,03
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,72	0,81	0,82	0,95
5	Bangunan	5,46	5,63	5,49	5,29
6	Perdagangan,Hotel & restaurant	11,68	11,28	11,4	11,76
7	Angkutan & Komunikasi	3,18	3,28	3,30	3,39
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9,72	9,48	9,32	9,56
9	Jasa-jasa	14,72	15,48	16,81	16,81
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Majene

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Majene mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Pembentukan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Majene diatur dengan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Majene
- b) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene
- c) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
- d) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan
- e) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

- f) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Majene
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- h) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka di Kabupaten Majene terdapat 59 SKPD, dengan susunan kelembagaan sebagai berikut :

- a) Sekretariat, 2 (dua) SKPD setingkat eselon II
- b) Badan-badan, 9 (sembilan) SKPD setingkat eselon II
- c) Dinas-dinas, 16 (enam belas) SKPD setingkat eselon II
- d) Kantor-kantor, 5 (lima) SKPD setingkat eselon III
- e) Kecamatan, 8 (delapan) SKPD setingkat eselon III
- f) Kelurahan, 20 (dua puluh) SKPD setingkat eselon IV

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Majene pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se Kab. Majene

SEKRETARIAT	BADAN	DINAS	KANTOR	KECAMATAN	KELURAHAN
1. Sekretariat Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Dinas Pendidikan	1. Kantor Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumen tasi Daerah	1. Banggae,	1. Banggae
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat	2. Dinas Kesehatan	2. Rumah Sakit Umum Daerah	2. Banggae Timur	2. Pangali-Ali
	3. Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3. Satuan Polisi Pamong Praja	3. Pamboang	3. Labuang
	4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	4. Sendana	4. Baru
		5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	5. Tubo Sendana	5. Totoli
		6. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika		6. Tammerodo Sendana	6. Baruga
				7. Malunda	7. Baruga Dhua
				8. Ulumanda	8. Tande
					9. Baurung
					10. Lalampnua
					11. Sirindu
					12. Mosso
					13. Mosso Dhua

SEKRETARIAT	BADAN	DINAS	KANTOR	KECAMATAN	KELURAHAN
	5. Badan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	7. Dinas Pekerjaan Umum			14. Malunda
	6. Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan			15. Labuang Utara
	7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata			16. Lembang
	8. Inspektorat Daerah	10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah			17. Rangas
		11. Dinas Pendapatan Daerah			18. Tande Timur
		12. Dinas Pertanian dan Peternakan			19. Galung
		13. Dinas Kelautan dan Perikanan			20. Lamungan Batu
		14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan			
		15. Dinas Pertambangan dan Energi			
		16. Dinas Perumahan, Permukiman & Kebersihan			

Dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD di atas maka Pemerintah Kabupaten Majene berusaha untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”**.

Untuk pembagian bidang urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka Kabupaten Majene juga membagi urusan kewenangan masing-masing SKPD tersebut kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Adapun pembagian urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene, sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

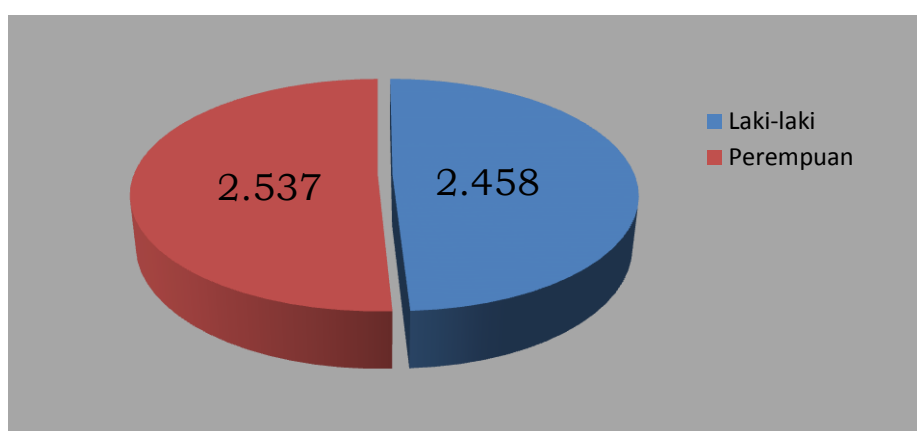
Tabel 1.6 Pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pada Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Majene

Urusan Wajib	Urusan Pilihan	SKPD Pelaksana
Urusan Pendidikan		Dinas Pendidikan
Urusan Kesehatan		Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah
Urusan Lingkungan Hidup		Badan Lingkungan Hidup & Pertamanan
Urusan Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum
Urusan perumahan		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan
Urusan Penataan Ruang		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Perencanaan Pembangunan		
Urusan Statistik		
Urusan Penanaman Modal		
Urusan Kependudukan dan Sipil		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan KB dan Keluarga Sejahtera		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa		Badan Pemerintahan Desa, Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi		Sekretariat DPRD
		Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah

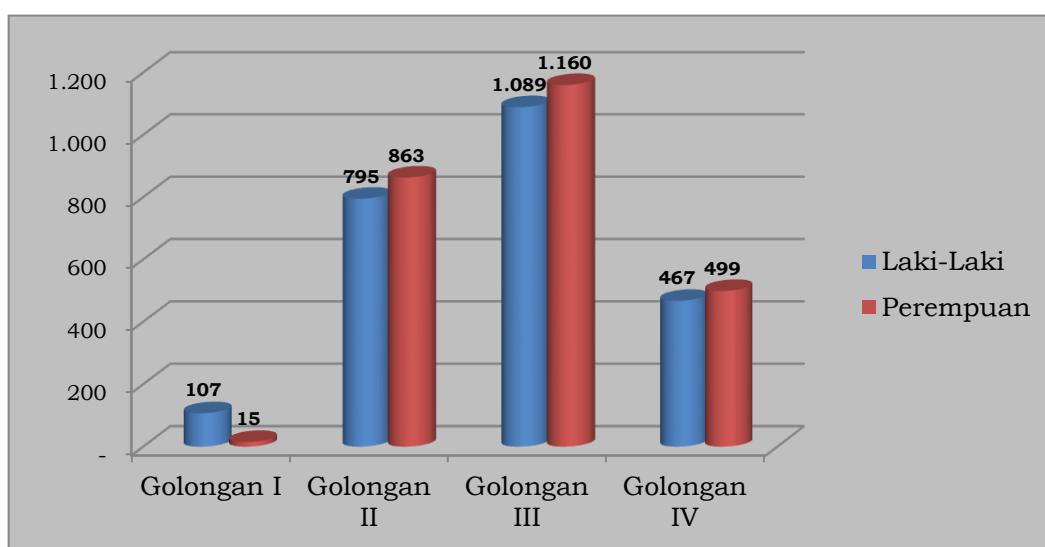
Urusan Wajib	Urusan Pilihan	SKPD Pelaksana
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian		Dinas Pendapatan Daerah
		Inspektorat
		Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
		Sekretariat Dewan Pengurus Koperasi
		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
		Kecamatan dan Kelurahan
Urusan Pertanahan		Sekretariat Daerah
Urusan Komunikasi dan Informasi		Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
Urusan Perhubungan		
Urusan Kesatuan Bangsa & Politik		Badan Kesbang Politik Dan Perlindungan Masyarakat
		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Kearsipan		Kantor Perpustakaan Umum, Arsip & Dokumentasi
Urusan Perpustakaan		
Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
		Dinas Pertanian dan Peternakan
	Urusan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Urusan Energi dan Sumber Daya	Dinas Pertambangan & Energi
Urusan Kepemudaan & Olah Raga	Urusan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Kebudayaan		
Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
	Urusan Perdagangan	
Urusan Sosial	Urusan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
Urusan Ketenagakerjaan		

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kabupaten Majene didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene yang pada tahun 2014 berjumlah 4.995 orang. Adapun kondisi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene dalam berbagai kategori sebagaimana tergambar di bawah ini :

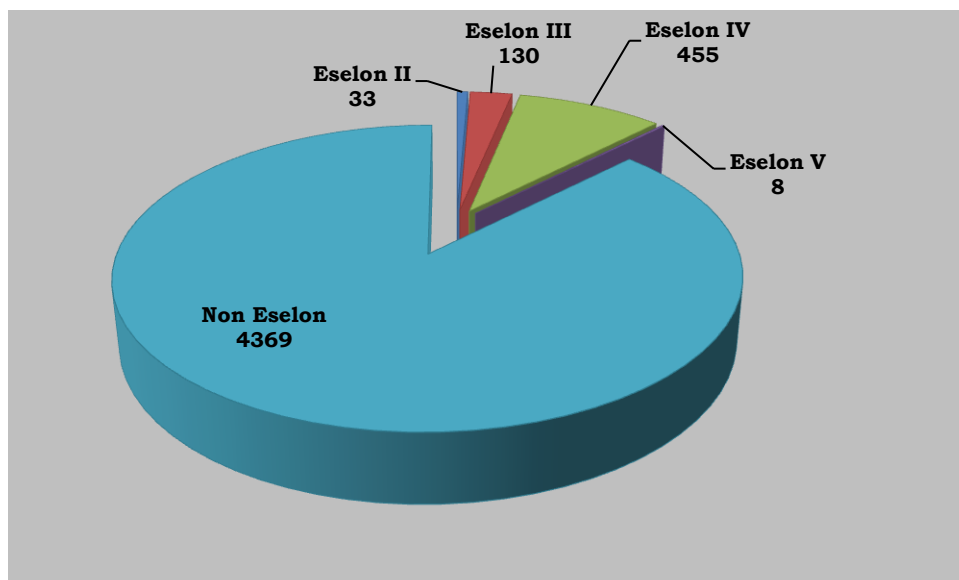
Gambar 1.1
Jumlah PNS di Kabupaten Majene
Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.2
Jumlah PNS di Kabupaten Majene
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan



Gambar 1.3
Jumlah PNS di Kabupaten Majene
Berdasarkan Eselon



Gambar 1.4
Jumlah PNS di Kabupaten Majene
Berdasarkan Pendidikan



1.4. ISU STRATEGIS DAERAH

Sejalan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, terdapat permasalahan pokok sebagai isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Majene pada tahun 2014 dan perlu ditangani. Isu-isu tersebut antara lain sebagai berikut :

- Terjadinya kecenderungan perlambatan Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan menurunnya kontribusi sektor pertanian yang tidak didukung dengan peningkatan sektor perekonomian lainnya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Majene;
- Terjadinya penurunan produksi pada beberapa komoditi sektor pertanian yang disebabkan alih fungsi lahan, anomali iklim akibat pemanasan global serta belum optimalnya ketersediaan infrastruktur khususnya dalam menunjang aksesibilitas menuju kawasan produksi dan pemasaran komoditi pertanian
- Masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk sebesar 16,52% ppada Tahun 2013 atau posisi kedua terbanyak di Tingkat provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Polewali Mandar
- Belum optimalnya kualitas dan pemerataan pelayanan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah.
- Masih terdapatnya kesenjangan pertumbuhan antar daerah, aksesibilitas antar daerah dan wilayah akibat penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang kurang seimbang dengan kebutuhan masyarakat.
- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Good Governance akibat dari belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan